IMPLEMENTASI *ELEKTRONIK MONITORING* DAN EVALUASI DI BIDANG PERENCANAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

JURNAL

FATMIN ABAS
NIM. DO2416295

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 0

IMPLEMENTASI *ELEKTRONIK MONITORING* DAN EVALUASI (*E-MONEV*) DI BIDANG PERENCANAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

Fatmin Abas[1], Srihandayani Suprapto[2], Muh. Firyal Akbar[3]

[1)]Sarjana Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo

[2,3)]Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212

Email: fatmin_abas@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the Implementation of Electronic Monitoring and Evaluation in the Planning Sector of Gorontalo Provincial Health Office. This research is included in the type of descriptive research with a qualitative research approach. The results of the study that the Implementation of Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) in the Field of Planning of the Gorontalo Province Health Office in general has been going well. The results of the research with the implementation indicators are: 1) Communication, this aspect has been going well, where communication in the implementation of E-Monev is done in the form of socialization or training activities, 2) Resources, this aspect has not fully gone well, where it was found that the existing human resources are not fully ready in the implementation of e-Monev and the equipment resources used have not been able to provide good connectivity in the internet network, 3) Disposition, this aspect has been fully running well, where there is compliance with the compliance of employees in implementing policies regarding e-monev, and 4) Bureaucratic Structure, this aspect has been fully implemented well. Where in applying the policy regarding e-Monev is in accordance with PP No. 39 of 2006 and PERMENDAGRI No. 54 of 2019 concerning Procedures for Controlling and Evaluating the Implementation of Development Plans.

Keywords: Implementation, E-Monev

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi *Elektronik Monitoring* dan Evaluasi di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa Implementasi *Elektronik Monitoring* dan Evaluasi (*E-Monev)* di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo secara umum sudah berjalan dengan baik. Adapun hasil penelitian dengan indikator implementasi tersebut adalah: 1) Komunikasi, aspek ini sudah berjalan dengan baik, dimana komunikasi dalm implementasi E-Monev dilakukan dalam bentuk sosialisasi ataupun kegiatan pelatihan, 2) Sumberdaya, aspek ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana ditemukan bahwa sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya siap dalam impelemntasi *e-monev* serta sumberdaya peralatan yang digunakan belum mampu memberikan konektivitas yang baik dalam jaringan internet, 3) Disposisi, aspek ini sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana adanya kepatuhan kepatuhan para pegawai dalam melaksanakan kebijakan mengenai *e-*monev tersebut, dan 4) Struktur Birokrasi, aspek ini sepenuhnya telah berjalan dengan

baik. Dimana dalam penerapan kebijakan mengenai *e*-monev sudah sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Kata Kunci: *Implementasi, E-Monev*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan kewenangan daerah sesuai dengan urusannya, perlu dilandasi oleh rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi dinamika saat ini serta tujuan tersebut, maka diperlukan perencanaan di berbagai sektor pembangunan. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif.

Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dengan perencanaan yang tepat maka tujuan pembangunan dapat tercapai. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik pemerintah memerlukan integrasi antar keahlian sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global (Michael Hitt, 2001).

Menurut Kuncoro & Suharjono (2002), pelaksanaan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan strategis. Tahap ini dilakukan sebelum proses evaluasi dilakukan dimana dengan melihat pelaksanaan, hasil evaluasi akan diketahui. Setiap daerah dituntut untuk mengembangkan perencanaan Strategis, mulai dari rumusan dan formulasi, pelaksanaan sampai evaluasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penyusunan payung perencanaan (Garis-Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah) hingga kerangka implementasi pembangunan daerah dalam bentuk rencana-rencana strategis (*Strategic planning*) dan Rencana Aksi (*Action Planning*).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana-rencana pembangunan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana-rencana pembangunan bagi masing-masing SKPD yang ada dalam lingkup pemerintah daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019.

Dokumen Renstra-SKPD sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara terencana, terpadu, bertahap dan berkelanjutan, sehingga Renstra-SKPD menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Besarnya anggaran dan banyaknya kegiatan yang harus dilaporkan juga merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk membuat dan menyampaikan laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan kepada pemerintah pusat, apalagi dilihat dari akses ke lokasi dan jarak yang harus ditempuh. Untuk itu keberadaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis elektronik "*web based*" yang terintegrasi menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan kegiatan pembangunan, karena selama ini pemerintah daerah selalu kesulitan untuk menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta standar bagi seluruh SKPD.

Pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan institusi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi daerahnya, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapa, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada pelaksanaanya E-Monev di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini diduga di karenakan adanya lambatnya operasional pendukung jaringan internet yang sering kali terjadi disaat akan diadakan penginputan data dilapangan atau di SKPD itu sendiri. Serta tidak sinkronnya data base keuangan dan lembaga pemerintah Bappeda dan Biro P2E Provinsi Gorontalo, yang kadang terjadi kesalahan update data, maka disitulah akan terjadi perbedaan data.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta, situasi atau kejadian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka

Penelitian ini telah dilaksanakan di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo berada tepatnya Jl. Pangeran Hidayat No. 202, Kecamatan Paguyaman, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128. Penelitian rencananya akan dilaksanakan selama 2 bulan terhitung sejak bulan Januari-Februari Tahun 2020.

Sumber data pada dalam penelitian ini dibagi atas dua jenis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memaknai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara), serta melakukan observasi (pengamatan langsung terhadap penelitian). Dalam memperoleh data yang valid dan sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan para informan yang dianggap mampu dan mengetahui apa yang menjadi fokus penelitian. Adapun informan yang telah dipilih tersebut adlah:

   a. Kepala Dinas Kesehatan
   b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
   c. Operator Program *E-Monev* 3 orang.

   Sehingga total informan yang digunakan sebagai sumber data primer sebanyak 5 orang

2. Data Sekunder

   Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh berasal dari beberapa instansi terkait yakni BAPPEDA, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi. Data sekunder yang diperoleh dari intansi tersebut terkait dengan dokumen-dokumen, catatan catatan, data profil lembaga atau instansi terkait dengan kegiatan *E-Monev* di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

   Observasi, ialah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan ditelitiDalam melakukan observasi, peneliti akan melakukan pengamatan secara mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan.

2. Wawancara

   Wawancara, ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan dengan melakukan

tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan semua informan yang dipilih berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni pengumpulan data dari sumber-sumber nonvisual yakni berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan rekaman yang ada relevansinya dengan kebutuhan data yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini data yang dijaring berupa dokumen yaitu meliputi profil lokasi penelitian, data pegawai dan data sarana prasarana.

Analisis data yang digunakan dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan lain-lain. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu (1) *data reduction,* (2) *data display,* dan (3) *conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Elektronik Monitoring* dan Evaluasi (*E-Monev*) di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Konsep implementasi menurut George Edward III yang dikutip oleh Widodo (2010) bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi adalah proses transfer informasi dari pengirim ke penerima. Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa "komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Dalam implementasi aplikasi *E-Monev* di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Bidang Perencanaan sudah berupaya untuk mengkomunikasikannya kepada para pegawai agar terjadi pemahaman mengenai aplikasi tersebut, sebagaimana disampaikan oleh informan yang juga sebagai Plh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo ketika ditanyakan tentang "Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan aplikasi *E-Monev* ini di Bidang Perencanaan?" beliau mengatakan:

> *"*Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi mengenai penerapan e-monev dilingkungan dinas kesehatan provinsi gorontalo. Sosialisasi itu dilakukan oleh BAPEDDA yang kemudian di lakukan kembali secara internal oleh Bidang Perencanaan*" (Wawancara dengan, LU tanggal 05 Februari 2020)*

Informan lainnya selaku Kasubag dan Evaluasi ketika ditanyakan mengenai komunikasi yang dilakukan

dalam penerapan aplikasi *e-monev* di Bidang Perencanaan, beliau mengatakan sebagai berikut:

> *"*Komunikasi dibangun dengan cara menyampaikan mengenai pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan aplikasi *e-monev" (Wawancara dengan KNA, tanggal 02 Februari 2020)*

Demikian juga disampaikan oleh informan lainnya yakni 3 orang operator program *e-monev* di bidang perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang mengatakan:

> *"*Melalui kegiatan sosialisasi ataupun workshop baik yang dilakukan oleh BAPEDDA maupun oleh dinas kesehatan itu sendiri*" (Wawancara dengan NW Tanggal 28 Januari 2020)*
>
> *"*Dilakukan dengan cara menyampaikan mengenai aplikasi e-monev*" (Wawancara dengan SA, tanggal 28 Januari 2020)*
>
> *"*Melalaui edaran oleh kepala dinas dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan*" (Wawancara dengan ED, tanggal 28 Januari 2020)*

Terkait dengan tujuan dan sasaran adanya aplikasi ini, para informan yang diwawancarai menyangkut pertanyaan "Apakah tujuan dan sasaran dari pelaksanaan aplikasi *E-Monev* ini disampaikan pada kegiatan komunikasi tersebut?" Plh Kepala Dinas ketika diwawancarai beliau mengatakan:

> *"*Ya, tentunya kegunaan dari adanya aplikasi *e-monev* ini disampaikan pada kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan yang dilakukan baik oleh BAPEDDA maupun dinas kesehatan itu sendiri*" (Wawancara dengan LU, tanggal 05 Februari 2020)*

Ketika hal yang sama ditanayakan kepada informan lainnya yakni Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, beliau menyatakan:

> *"*Ya, disampaikan apa keunggulan dari aplikasi *e-monev* ini*" (Wawancara dengan KNA, tanggal 02 Februari 2020)*

Pun demikian halnya dengan 3 orang operator program ketika ditanayakan terkait dengan tujuan dan sasaran dari aplikasi *e-monev*, mereka mengatakan:

> *"*Ya, disampaikan karena aplikasi ini memang masih baru dalam penerapannya*" (Wawancara dengan NW, tanggal 28 Januari 2020)*
>
> *"*Tentu, karena biasanya dalam sosialisasi dan pelatihan itu pasti yang menjadi tujuannya pasti disampaikan*" (Wawancara dengan SA, tanggal 28 Januari 2020)*
>
> *"*Ya, disampaikan oleh pihak yang berkompoten*" (Wawancara dengan ED, tanggal 28 Januari 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan diatas, maka peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam hal komunikasi yang terkait dengan implementasi *e-monev* di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo didapatkan bahwa komunikasi yang terjadi dalam bentuk sosialisasi ataupun kegiatan pelatihan terkait impelementasi *e-monev* tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan tersebut, seluruh pegawai yang terkait dengan *e-monev*

ini diberikan pemahaman mengenai tujuan dan sasaran dilakukannya penerapan aplikasi tersebut. Pelaksana dari kegiatan tersebut adalah dari pihak BAPEDDA Provinsi Gorontalo dan juga dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

2) Sumberdaya

Sumberdaya adalah sebuah aspek pendukung dalam sebuah kegiatan, sumberdaya terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian pada 3 aspek sumber daya tersebut. Pada aspek pertama yakni sumber daya manusia, peneliti mengajukan pertanyaan "Bagaimana kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan aplikasi *E-Monev* di bidang perencanaan?" terkait dengan pertanyaan tersebut, Plh Kepala Dinas Kesehatan mengatakan bahwa:

> *"*Secara umum memang sumber daya manusia kita siap, namun memang tidak secara cepat mampu dalam mengaplikasikan sistem ini*" (Wawancara dengan LU, tanggal 05 Februari 2020)*

Demikian juga disampaikan oleh Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan, beliau menyampaikan:

> *"*SDM Dinas Kesehatan memang siap untuk beberapa hal, namun untuk penggunaan aplikasi ini memang butuh waktu yang banyak dalam penerapannya*" (Wawancara dengan KNA, tanggal 02 Februari 2020)*

Operator program yang ada di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan yang berjumlah 3 orang ketika diwawancarai terkait sumber daya manusaia mereka mengatakan:

> *"*Siap atau tidak kita harus bisa melaksanakannya*" (Wawancara dengan NW, tanggal 28 Januari 2020)*
>
> *"*Namanya sistem yang baru pasti pada awalnya akan sedikit bermasalah*" (Wawancara dengan SA, tanggal 28 Januari 2020)*
>
> *"*Perlu waktu untuk penerapannya, karena sudah terbiasa dengan yang manual pasti akan sedikit bingung dengan aplikasi yang tersistem apalagi hampir setiap minggu memberikan laporan*" (Wawancara dengan ED, tanggal 28 Januari 2020)*

Selanjutnya masih dalam aspek sumber daya, peneliti mengajukan pertanyaan terkait sumber daya anggaran dengan mengajukan pertanyaan "Apakah dalam penerapan aplikasi *E-Monev* di bidang perencanaan didukung pula dengan sumber daya anggaran? Plh Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa:

> *"*Ya, tentunya kita selalu menyiapkan anggarana terkait dengan kegiatan*" (Wawancara dengan LU, tanggal 05 Februari 2020)*

Masih pada aspek sumber daya, peneliti mengajukan pertanyaan terkait sumber daya peralatan dengan mengajukan pertanyaan "Dalam pelaksanaan aplikasi *E-Monev* ini di bidang perencanaan, apakah didukung dengan fasilitas yang memadai pula? Plh Kepala Dinas Kesehatan mengatakan:

*"*Fasilitas memang sudah disediakan dalam penerapan aplikasi ini, namun selalu terhalang dengan jaringan nirkabel yang selalu ngadat ketika aplikasi ini mulai digunakan sehingga menyebabkan laporan yang sering terlambat*" (Wawancara dengan LU, tanggal 05 Februari 2020)*

Serupa dengan jawaban dari Plh Kepala Dinas, kasubag perencanaan dan evaluasi Bidang Perencanaan mengatakan:

*"*Bila bicara fasilitas fisik iya, namun selalu terhalang oleh jaringan yang tidak pernah stabil sehingga menganggu pelaporan*" (Wawancara dengan KNA, 02 Februari 2020)*

Pun demikian yang disampaikan oleh informan lainnya yakni operator program di Bidang Perencanaan yang berjumlah 3 orang mengatakan:

*"*Didukung dengan fasilitas berupa adanya laptop ataupun komputer bagi masing-masing pengelola*" (Wawancara dengan NW, tanggal 28 Januari 2020)*

*"*Ya, didukung fasilitas tapi sering ngadat karena jaringan wifi*" (Wawancara dengan SA, tanggal 28 Januari 2020)*

*"*Ya didukung dengan penyediaan fasilitas terkait dengan aplikasi ini*" (Wawancara dengan ED, tanggal 28 Januari 2020)*

Dari hasil wawancara peneliti kepada para informan yang terdiri atas Plh Kepala dinas, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi dan operator program terkait indikator sumberdaya, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang ada dalam indikator ini yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan belum sesuai dengan seharusnya. Artinya bahwa ketiga sumber daya ini belum maksimal dapat dilakukan kaitannya dengan implementasi *e-monev* di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Hal ini tekait dengan adanya kurang siapnya sumber daya manusia dalam pengaplikasiannya juga dari sisi fasilitas yakni jaringan yang selalu ngadat disetiap pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan molornya laporan yang dilakukan.

3) Disposisi

Disposisi adalah kecenderungan, kemauan dari pemangku kepentingan untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan aplikasi *e-monev* di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan provinsi Gorontalo peneliti cenderung memfokuskan pada kesungguhan para pegawai dalam pelaksanaan *e-monev* ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan bahwa disposisi sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan".

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap para informan terkait dengan indikator disposisi dengan mengajukan pertanyaan "Apakah semua pihak yang terkait (pegawai) di bidang perencanaan, memahami dan mendukung adanya

penerapan aplikasi *E-Monev* ini?" Terkiat dengan pertanyaan tersebut, Plh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyampaikan sebagai berikut:

> *"*Ya, karena ini sudah menjadi aturan dari atas, maka sebagai pegawai semua harus mendukung*" (Wawancara dengan LU, tanggal 05 Februari 2020)*

Demikian pula disampaikan oleh Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan, dimana terkait dengan pertanyaan diatas, beliau mengatakan:

> *"*Ya tentunya semuanya mendkung tapi memang tidak semua pegawai mampu secara konsisten dalam melaksanakannya*" (Wawancara dengan KNA, 02 Februari 2020)*

Jawaban yang hampir sama disampaikan juga oleh para operator program yang bertugas di Bidang Perencanaan dimana mereka mengatakan:

> *"*Tidak semua memahami secara utuh, karena masing-masing punya keterbatasan, soal mendukung pasti karena ini sudah menajdi aturan*" (Wawancara dengan NW, tanggal 28 Januari 2020)*
>
> *"*Ya, semua pegawai memahami dan mendukung adanyanya aplikasi ini*" (Wawancara dengan SA, 28 Januari 2020)*
>
> *"*Ya, tentu sebagai pegawai kita harus mendukung*" (Wawancara dengan ED, tanggal 28 Januari 2020)*

Namun apakah disposisi yang menjadi aspek dalam implementasi dapat dilaksanakan dengan baik? Terkait hal tersebut peneliti mengajukan pertanyaan "Apakah semua pegawai di bidang perencanaan melaksnakan kegiatan *E-Monev* ini secara patuh?" Plh Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa:

> "Ya, semua patuh pada aturan" (*Wawancara dengan LU, tanggal 05 Februari 2020*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam aspek disposisi yakni menyangkut tentang kepatuhan para pegawai dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh atasan telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa semua pegawai yang ada di Bidang Perencanaan patuh dan taat dalam melaksanakan kebijakan tersebut yakni *e-monev*.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010) mencangkup aspek- aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi dan sebagainya. Selain itu disisi lain Edward II memfokuskan struktur birokrasi itu pada aspek standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Terkait dengan aspek struktur birokrasi ini peneliti mengajukan pertanyaan "Apakah ada aturan yang menjadi dasar hukum penerapan

aplikasi *E-Monev* ini?" Plh Kepala Dinas dalam menjawab pertanyaan tersebut mengatakan bahwa dalam penerapan e-monev memang ada aturannya, dimana beliau mengatakan:

> *"*Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*" (Wawancara dengan LU, tanggal 05 Februari 2020).*

Demikian pula disampaikan oleh informan lainnya terkait dengan pertanyaan dsar hukum dari pelaksanaan e-monev tersebut, dimana para informan mengatakan:

> *"*Ada, yakni PP No. 39 dan Permendagri*" (Wawancara dengan NW, tanggal 28 Januari 2020)*
>
> *"*Ada, PP dan Peraturan Menteri dalam negeri*" (Wawancara dengan ED, tanggal 28 Januari)*

Selanjutnya masih dalam aspek struktur birokrasi tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan "Apakah dalam penerapan aplikasi *E-Monev* ini didukung dengan adanya SOP?" Plh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta informan lainnya yang terkait semuanya mengatakan bahwa dalam pelaksanaan e-monev tersebut ada standa Opersasional Prosedur (SOP) yang menjadi pijakan dalam kegiatannyan. Berikut hasil wawancara kepada para informan sebagai berikut:

> *"*Ya, tentunya kita mengikuti SOP yang telah diterbitkan oleh Bapenas maupun oleh BAPPEDA Provinsi*" (Wawancara dengan LU, tanggal 05 Februari 2020)*
>
> *"*Ya ada, biasanya dari BAPEDDA*" (Wawancara dengan KNA, 02 Februari 2020)*

Dari hasil wawancara tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dilihat dari aspek struktur birokrasi dalam penerapan *e-monev* di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo telah berjalan sebagaimana mestinya. Dimana dari hasil wawancara didapatkan bahwa para informan mengatakan bahwa dalam penerapan *e-monev* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Pada bagian ini akan diuraikan analisis hasil penelitian dari data yang diperoleh baik melalui kegiatan observasi maupun dari kegiatan wawancara yag dilakkan kepada para informan yang telah dipilih. Adapun hal-hal yang dibahas yaitu tentang implementasi dengan dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Edward III sebagaiman terurai dalam bahasan sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses transfer informasi dari pengirim ke penerima. Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa "komunikasi

adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Mulyana (2005) mengataka bahwa "komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan informasi, ide, emosi, keterampilan dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media-media tertentu".

Dalam implementasi aplikasi *e-monev* di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dilakukan dengan berbagai macam cara agar supaya aplikasi tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pegawai yang terkait dengan kegiatan *e-monev* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan, bahwa dalam hal komunikasi yang terkait dengan implementasi aplikasi *e-monev* di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo didapatkan bahwa komunikasi yang terjadi dalam bentuk sosialisasi ataupun kegiatan pelatihan terkait impelementasi *e-monev* tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan tersebut, seluruh pegawai yang terkait dengan aplikasi ini diberikan pemahaman mengenai tujuan dan sasaran dilakukannya penerapan aplikasi tersebut. Pelaksana dari kegiatan tersebut adalah dari pihak BAPEDDA Provinsi Gorontalo dan juga dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah sebuah aspek pendukung dalam sebuah kegiatan, sumberdaya dalam kajian ini terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan. Ketiga sumber daya tersebut dilakukan kajian karena sangat terkait dengan temuan pada saat dilakukan observasi awal.

Dari hasil wawancara peneliti kepada para informan yang terdiri atas Plh Kepala dinas, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi dan operator program terkait indikator sumberdaya, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang ada dalam indikator ini yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan belum sesuai dengan seharusnya. Artinya bahwa ketiga sumber daya ini belum maksimal dapat dilakukan kaitannya dengan implementasi *e-monev* di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Hal ini tekait dengan adanya kurang siapnya sumber daya manusia dalam pengaplikasiannya juga dari sisi fasilitas yakni jaringan yang selalu ngadat disetiap pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan molornya laporan yang dilakukan.

Sehingga dalam menjawab hasil temuan pada saat observasi awal yakni 1) Adanya hambatan dalam konektivitas dan kecepatan dalam akses internet sehingga menyebabkan sering terlambatnya dalam pembuatan laporan, 2) Terbatasnya pemahaman pegawai dalam memahami sistem *e-monev* sehingga pelaksanaan sistem ini masih belum sepenuhnya terlaksana, dan 3) Terjadinya keterlambatan perencanaan disebabkan kurang lengkapnya pertanggungjawaban oleh setiap bagian yang disebabkan adanya data pendukung laporan berupa bukti foto. Dapat dikatakan bahwa kedua maslah

tersebut terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya peralatan. Sumber daya manusia karena belum begitu siap dalam pengaplikasian *e-monev* ini sehingga menyebabkan dalam pembuatan laporan atau pengiriman laporan sering lupa dalam melampirkan foto-foto terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan. Demikian pula sering terlambatnya dalam pembuatan laporan yang juga disebabkan adanya konektivitas jaringan internet yang lamban sehingga menyebabkan hal tersebut sering terjadi.

3. Disposisi

Disposisi adalah kecenderungan, kemauan dari pemangku kepentingan untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan kegiatan e-monev di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, peneliti cenderung memfokuskan pada kesungguhan pegawai ataupun pihak terkait dalam melaksanakn kebijakan tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Edward III dalam Widodo (2010) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan".

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para informan didaptkan bahwa dalam aspek disposisi yakni menyangkut tentang kepatuhan para pegawai dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh atasan telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa semua pegawai yang ada di Bidang Perencanaan patuh dan taat dalam melaksanakan kebijakan tersebut yakni *e-monev*.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010) mencangkup aspek- aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Selain itu disisi lain Edward II memfokuskan struktur birokrasi itu pada aspek standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para informan bahwa dilihat dari aspek struktur birokrasi dalam penerapan *e-monev* di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo telah berjalan sebagaimana mestinya. Dimana dari hasil wawancara didapatkan bahwa para informan mengatakan bahwa dalam penerapan *e-monev* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Penelitian ini sangat berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Iasa Kurniasari (2014) dengan judul penelitian "Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan

Anak di Provinsi Jawa Tengah. Dimana kajian fokus dan sasaran yang dilakukan berbeda dengan yang peneliti kaji. Akan tetapi dalam hal sistem ataupun aplikasi dalam pelaporan sebuah monitoring dan evaluasi program ada persamaannya.

Namun penelitian ini cukup banyak berkesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Afiah, Andi Nur (2017) dengan judul penelitiannya "Peranan Elektronik Anggaran (E-MPA) sebagai Sistem Informasi Akuntansi dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas pelaporan keuangan pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sinjai. Dimana hasil kajian yang dilakukan bahwa dalam hal kecepatan dan kwalitas internet sangat mempengaruhi dalam pelaporan yang berbasis elektronik, selain itu persamaan yang terjadi adalah bahwa dalam penerapannya sering terhalang dalam aspek keterampilan manusia dalam melaksanakan aplikasi tersebut serta ketepatan aspek ataupun bukti pelaksanaan setiap kegiatan yang akan dikirimkan melalui aplikasi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Elektronik Monitoring* dan Evaluasi (*E-Monev)* di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo secara umum sudah berjalan dengan baik. Adapun hasil penelitian dengan indikator implementasi tersebut adalah: 1) Komunikasi, aspek ini sudah berjalan dengan baik, dimana komunikasi dalm implemntasi E-Monev dilakukan dalam bentuk sosialisasi ataupun kegiatan pelatihan, 2) Sumberdaya, aspek ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana ditemukan bahwa sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya siap dalam impelemntasi *e-monev* serta sumberdaya peralatan yang digunakan belum mampu memberikan konektivitas yang baik dalam jaringan internet, 3) Disposisi, aspek ini sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana adanya kepatuhan kepatuhan para pegawai dalam melaksanakan kebijakan mengenai *e*-monev tersebut, dan 4) Struktur Birokrasi, aspek ini sepenuhnya telah berjalan dengan baik. Dimana dalam penerapan kebijakan mengenai *e*-monev sudah sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian yang lebih pada aspek sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan
2. Perlu dilakukan pelatihan secara menyeluruh kepada semua pegawai dalam hal pelaporan secara *elektronik*.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, Andi Nur, 2017. Peranan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (E-Mpa) Sebagai Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Integritas Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai

Edward, George. C. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C

Hitt, Michael A., Ireland, R. Duane and Hoskisson, Robert E. 2001. Strategic Manajement: Competitiveness and Globalization, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta, Salemba Empat,

Iasa Kurniasari. 2014. Sistem Informasi Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu Dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah

Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

Kuncoro dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi), Edisi Pertama, Penerbit BPFE. Yogyakarta

Subarsono, AG.2011. Analisis kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Rianto, Budi., Tri Lestari. 2012. Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. CV. Putra Media Nusantara (PMN). Surabaya

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi; Mixed Methods. Alfabeta. Bandung.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wahab, Abdul, Solichin 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta. BumiAksara.

Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang. Bayumedia.

Winarno, Budi. 2014. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Press.